



# Program Pengentasan Kemiskinan Sentuh Masyarakat

**PONTIANAK, SP** - Sekretaris Daerah (Sekda) Harisson memastikan program-program terkait dalam upaya penentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan menanggapi isu di pusat, tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk kemiskinan.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas sempat menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga saat menghadiri Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023 di Jakarta Pusat,

Jumat (27/1) lalu.

Menurutnya anggaran yang mencapai hampir Rp500 triliun itu, justru lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sehingga Menpan RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk di Pemprov Kalbar dalam program pengentasan kemiskinan tentunya tidak mengikut pusat. Kalau pusat ini kan sebenarnya lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi, dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang (peserta) daerah, pakar atau ahli. Hasilnya itulah yang dikirim ke Pemprov, maupun kabupaten/kota,” ungkap Sekda Kalbar

Harisson pada Selasa (31/1).

Harisson memastikan untuk di Pemprov hingga pemerintah kabupaten kota program pengentasan kemiskinan bersifat langsung. Program yang dijalankan tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, dan tersebar di beberapa perangkat daerah terkait.

Diantaranya menurut Harisson pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah untuk sekolah negeri. Lalu bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam dan lainnya untuk masyarakat miskin.

Selanjutnya pada Di-

nas Kesehatan, selalu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau wilayah penduduk miskin. Selain itu Pemprov Kalbar juga membangun fasilitas RSUD dr Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap. Hal tersebut semua untuk melayani masyarakat Provinsi Kalbar.

“Kemudian (Pemprov) mensubsidi PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan,” katanya.

Kemudian Harisson mengungkapkan pada Dinas PUPR dan Perkim juga banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Seperti perbaikan atau bedah rumah warga yang ti-

dak layak huni.

Sehingga program-program itu semua akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kalbar.

“Selain itu juga masih banyak lagi, program-program yang tersebar di beberapa perangkat daerah lain,” tuturnya.

Harisson menjelaskan, persentase penduduk miskin Kalbar pada bulan September 2022 angkanya sebesar 6,81 persen, atau meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Sementara jika dibandingkan dengan bulan September 2021, angka tersebut menurun 0,03 poin. **(din)**